Problematika Pendidikan di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Bahagian Sarawak, Malaysia

Budi Sulistya Handoyo¹, Reza Triarda²
Universitas Brawijaya

ABSTRACT

Education as one of the basic rights or fundamental rights that everyone must own has been discussed since 1948 in the Universal Declaration of Human Rights. Primary education becomes important later because education is a strategic aspect of human life. Malaysia, as one of the destination countries of Indonesian migrant workers as a place to work. From the data of 2.7 million people spread throughout the territory of Malaysia. The problems that arise are not only in the administration of the workers but also the children they bring to work there. It becomes a dilemma because the government cannot go down directly because of obstacles such as national borders and the applicable rules. The Transnational Public-Private Partnership, which is then carried out between the two countries and a third party, private then, can fulfill that education. CLC or Community Learning Center is a manifestation of this form of public-private collaboration. In this case, the private sector's involvement is significant in fulfilling the education of Indonesian migrant worker children in the Sarawak region. To date, 62 CLCs provide access to education for 1,658 Indonesian children. With local teachers/tutors who are Indonesian citizens, the company recruits to teach with a minimum high school / vocational certificate. Until June 2019, there were 94 Pamong Teachers in the Sarawak CLC, and Bina Teachers were teachers sent by the Indonesian Government (Kemendikbud RI) to teach at the CLC. As of June 2019, there were 23 Bina Teachers in the Sarawak CLC.

Keywords: *Education, CLC, Transnational Public-Private Partnership, Migrant Workers, Palm Oil*

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai salah satu hak dasar atau hak fundamental yang harus dimiliki oleh semua orang telah dibahas sejak tahun 1948 pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (United Nations, 1948). Pendidikan sebagai salah satu *Public Goods* kemudian seharusnya dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, visi dari *Sustainable Development Goals* kemudian menjelaskan bahwasanya pendidikan merupakan *Public Goods* yang memiliki dua sifat atau karakteristik, yaitu non *rivalry* dan non *excludability*.

Pendidikan kemudian harus bisa diakses oleh semua orang dari semua kalangan sehingga dapat menjalankan dan membantu menyelesaikan *Goals* kelima dari SDG's itu sendiri yaitu *Quality Education* (UNESCO, 2015) hal ini kemudian juga termasuk oleh anak-anak Pekerja Migran Indonesia atau biasa disingkat PMI, hal ini kemudian karena kesamaan dan kesetaraan hak harus dimiliki oleh semua lapisan masyarakat termasuk pula dalam mengakses pendidikan.

Pendidikan merupakan tanggung jawab negara untuk memfasilitasi warga negaranya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional mengatur berbagai kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak setiap warga negaranya dalam memperoleh pendidikan di mana pun mereka

berada. Pasal 31 UUD 1945 setelah adanya perubahan menjadi berbunyi sebagai berikut (Viviansari, 2019):

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah masih memiliki beberapa pekerjaan yang belum terlaksana dengan baik, khususnya pemenuhan hak pendidikan warga negara yang tinggal di luar negeri. Dalam sistem pendidikan Indonesia, seluruh warga negara Indonesia harus menjalankan program pendidikan selama sembilan tahun, yaitu meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat selama 6 tahun serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat selama tiga tahun. Bahkan kemudian dikeluarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian mengatur mengenai wajib belajar 12 tahun yang juga upaya pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan menengah universal yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Republik Indonesia, 2016). Selain itu, Indonesia merupakan negara anggota *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) yang semestinya turut menjunjung misi UNESCO mengenai pendidikan sebagai hak asasi manusia.

Malaysia sebagai salah satu negara tujuan dari bermigrasinya orang Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak, hingga tahun 2017 PMI dengan status yang berada di Malaysia berdasarkan data dari pemerintah Malaysia yang dikutip oleh situs Kementerian Luar Negeri adalah sebanyak 2,7 juta jiwa yang tersebar ke seluruh wilayah Malaysia (Putra, 2017), 136.000 orang berada di Sarawak secara legal dan juga sekitar 300.000-400.000 orang diperkirakan merupakan PMI yang masuk ke wilayah Malaysia secara ilegal berada pada wilayah Sarawak (Sutianto, 2016a).

Negeri Sarawak atau dalam bahasa Indonesia adalah Sarawak merupakan salah satu negara bagian Malaysia yang beribu kota di Kuching. Negeri Sarawak merdeka pada 16 September 1963 sebagai negara bagian (dalam federasi Malaysia). Sarawak menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa Inggris digunakan dalam bidang hukum dan peradilan. Sarawak terdiri dari 11 daerah yang disebut Bahagian, yaitu Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikei, Mukah, Sibul, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiap Bahagian tersebut dipimpin oleh seorang Residen.

Pemerintahan Sarawak berdasar pada dua konstitusi, yaitu Konstitusi Negeri (negara bagian/otonomi wilayah), dan Konstitusi Federal (Perlembagaan negeri dan Perlembagaan Persekutuan) (Putra, 2017). Sarawak memiliki perkebunan sawit yang luas, sehingga Sarawak menjadi salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Para pekerja di perkebunan sawit tersebut mayoritas berasal dari Indonesia, misalnya perusahaan kelapa sawit Woodman

Group yang memiliki lahan seluas 40.000 hektar di Miri, Sarawak telah mempekerjakan 8.000 orang dengan 80% di antaranya merupakan tenaga kerja asal Indonesia (Sutianto, 2016b).

Para PMI yang bekerja di Sarawak ada yang diberangkatkan oleh pemerintah secara legal dan banyak pula yang berangkat dengan prosedur ilegal. Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia menyebabkan semakin besarnya juga upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui perwakilannya kepada PMI yang mengalami permasalahan selama bekerja di negara tersebut, dalam hal ini salah satunya adalah masalah pendidikan. Tenaga kerja asal Indonesia kebanyakan bekerja di perkebunan-perkebunan sawit di Sabah dan Sarawak. Mereka tergolong sebagai pekerja yang tidak terampil. Mereka memiliki periode kerja rata-rata selama 10 tahun, tetapi tidak diperbolehkan menikah dan membawa keluarga ke sana (Department of Labour Peninsular, 2014).

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan di Sarawak (*Section 119 of Sarawak Labour Ordinance*) menyatakan bahwa pekerja asing di bawah PLKS (Pas Lawatan Kerja Sementara) tidak diperbolehkan membawa tanggungan (Sarawak Lawnet, n.d.). Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak tenaga kerja yang menikah dan memiliki beberapa anak. Hal ini kemudian melahirkan permasalahan baru yaitu anak-anak PMI tidak dapat memiliki dokumen resmi lengkap, sehingga mereka sulit mendapatkan akses layanan guna pendidikan dan tidak dapat mendaftar di sekolah formal karena tidak dimilikinya dokumen resmi oleh anak-anak ini. Ketika anak-anak PMI di Sarawak tidak mengenyam pendidikan, maka mereka tidak dapat memperbaiki kondisi keluarga dan dapat memberi kerugian bagi negara.

Kondisi tersebut kemudian menghasilkan masalah yang lebih parah, yaitu munculnya anak-anak yang *stateless* (tidak berkewarganegaraan) akibat ketiadaan paspor dan izin tinggal orang tuanya serta pernikahan yang tidak tercatat. Kemudian timbul masalah besar lainnya yaitu anak yang tidak berdokumen atau *stateless* ini lantas menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan karena mereka tidak dapat mendaftar sekolah (Febriana, 2019a).

Anak-anak PMI yang tidak bersekolah kemudian akan menciptakan masalah berikutnya, yakni fenomena pekerja anak di bawah umur (*child labour*) dan pernikahan anak di bawah umur. Kalau diibaratkan, kita dapat melihatnya sebagai lingkaran setan yang tidak ada putusnya. Kerugian bagi pemerintah Indonesia adalah terjadinya peningkatan jumlah warga negara yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah, menurut data dari Imigresen Sarawak dari tahun 2011-2013 terdapat hingga lebih dari 3000 anak-anak Indonesia yang tidak mendapatkan akses pendidikan di Sarawak, Malaysia (Suara Kalbar, 2019). Hingga bulan Oktober 2019 terdapat 1.870 anak yang mendapatkan akses pendidikan pada CLC yang berada di wilayah Sarawak, namun perlu diketahui kemudian bahwasanya CLC Sarawak kemudian hanya mendapat izin untuk menyelenggarakan institusi sekolah hanya sampai pada Sekolah Dasar (SD) sehingga jenjang yang di atas dari SD adalah Ilegal (Perdini, n.d.).

Anak-anak PMI kesulitan mengakses pendidikan dikarenakan beberapa faktor. Pertama, pemerintah Malaysia memiliki kebijakan dalam negeri yang membatasi bahkan cenderung mempersulit keturunan warga negara asing untuk dapat menempuh pendidikan di sekolah yang berada di bawah naungan mereka (Viviansari, 2019). Kedua, keterbatasan tenaga pendidik dan sulitnya pendirian sekolah-sekolah yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dan keterbatasan aturan yang ada. Ketiga, masih rendahnya kesadaran para buruh migran untuk melakukan kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Faktor yang ketiga ini menjadikan anak-anak buruh migran Indonesia lebih memilih untuk bekerja di ladang membantu orang tuanya daripada harus bersekolah (Viviansari, 2019).

Lahirnya *Community Learning Center* atau CLC di Sarawak kemudian juga merupakan bentuk implementasi dan juga rasa tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap ratifikasi

Konvensi Hak Anak. Namun pada penerapannya CLC baru mendapatkan izin oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak baru pada tahun 2016 setelah diperjuangkan sejak tahun 2014 dan sudah membangun sekitar 16 dan hanya 8 unit CLC yang sudah lolos diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM di tahun 2016 yang tersebar di Miri, Bintulu, Mukah, dan Simunjan (TribunJateng, 2016).

Namun, CLC hanya terdapat di ladang-ladang kelapa sawit yang ada di wilayah Sarawak, hal ini sesuai dengan pertemuan *Joint Commision for Bilateral Cooperation/JCBC RI-Malaysia ke-13*, di Jakarta, 2 Desember 2013. Sehingga anak - anak pekerja migran yang berada di wilayah perkotaan tidak dapat mengakses hal tersebut karena sekolah negeri Malaysia hanya diperuntukkan kepada anak-anak Ekspatriat saja. Selain itu, CLC hanya bisa diakses hingga sekolah dasar saja sehingga ketika mereka memasuki sekolah lanjutan ke SMP maupun SMA mereka tidak dapat mengakses pendidikan lanjutan di mana orang tua mereka berada (KJRI Kuching, n.d.). Hal ini yang kemudian menyebabkan banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikannya dan membuat mereka tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang seterusnya. Saat ini, CLC di Sabah dan Sarawak membantu memberikan pelayanan pendidikan bagi 16.130 anak-anak Indonesia dari PMI yang bekerja di kedua negara bagian tersebut namun kemudian teruntuk di wilayah Semenanjung Malaysia, CLC tidak di perbolehkan (Febriana, 2019b).

KERANGKA PEMIKIRAN

Penulis menggunakan Teori Gerakan massa, Eric Hoffer menyebutkan bahwa dalam banyak kasus gerakan perubahan secara mendasar ditentukan oleh dinamika dan konfigurasi kekuasaan. Yang dimaksud adalah perubahan pada gilirannya akan ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan yang menghendaki perubahan dan kekuatan yang tidak menginginkan perubahan. Hoffer menekankan bahwa faktor penyebab suatu gerakan massa adalah yang pertama adanya keinginan akan perubahan. Gerakan massa yang terlibat dalam mewujudkan perubahan dengan cepat adalah gerakan revolusioner dan gerakan perjuangan nasional secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Sekumpulan rakyat akan menuntut akan adanya perubahan secara mendasar apabila mereka merasa hidupnya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Namun rasa tidak puas saja tidak cukup untuk menimbulkan keinginan akan perubahan. Harus ada faktor lain sebelum rasa tidak puas menjelma menjadi tindakan perlawanan. Faktor tersebut adalah keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Rakyat akan menunjukkan rasa tidak puasnya terhadap pemerintah dan meminta perubahan apabila mereka yakin dengan yang diinginkan adalah berupa perbaikan dalam bidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi (Hoffer, 1988: 3).

Faktor kedua adalah keinginan untuk mendapatkan pengganti. Faktor ini juga merupakan faktor utama terjadinya gerakan massa di Bahrain. Tanpa adanya keinginan untuk adanya pergantian pemimpin, akan sangat sulit terjadi perubahan taraf hidup lebih baik. Selain itu penulis juga menambahkan teori aksi kolektif yang dikemukakan oleh William Gamson dan Charles Tilly. Teorisasi pada kategori ini memusatkan perhatian besar pada persaingan atau konflik perebutan kekuasaan (perebutan dukungan massa) antara pemerintah yang berkuasa dengan kelompok-kelompok penentang terorganisir. Artinya dalam pemahaman Tilly, aksi kolektif lebih dimaknai sebagai tindakan sekelompok orang secara bersama dalam mencapai tujuan bersama. Jadi berdasar definisi ini perubahan sosial dan bentuk-bentuk protes sosial merupakan bentuk dari aksi kolektif. Menurut Tilly ketidakpuasan rakyat saja (baik akibat dislokasi sosial, modernisasi atau sebab-sebab lainnya) tidak serta merta membuat mereka melakukan aksi kolektif. Rakyat yang tidak puas tidak turut berpartisipasi aktif dalam aksi kolektif kecuali mereka menjadi bagian dari satu kelompok terorganisir yang memiliki beberapa sumber daya. Menurut Tilly, dalam aksi

kolektif terdapat dua elemen penting yakni organisasi dan sumber daya selain kondisi obyektif yang berupa ketidakpuasan yang meluas. Bahkan ancaman yang dilancarkan oleh pemerintah dan kelompok-kelompok kontra tidak bisa menyurutkan partisipasi rakyat tidak puas yang telah terorganisir dan memiliki sumber daya otonom untuk melakukan aksi kolektif (Tilly, 1978).

Sedangkan aksi kolektif menurut Gamson (1992) bertolak dari keberadaan kepentingan yang sama di masyarakat. Gamson membangun teori aksi kolektif berawal dari konsep pemikiran Mancur Olson bahwa individu dengan kepentingan yang sama biasanya mencoba mewujudkan kepentingan bersama itu sehingga kelompok individu dengan kepentingan yang sama diyakini bakal bertindak kolektif, namun tindakan ini dapat berlangsung jika ada kondisi khusus yang menyebabkan tindakan bersama ini berlangsung. Kondisi khusus yang mendorong kelompok dan individu dengan kepentingan yang sama untuk bertindak. Inilah yang selanjutnya menjadi tema sentral argumentasi Gamson. Dengan demikian, aksi kolektif terjadi ketika terbangun suatu kondisi khusus yang membuat sekelompok orang dengan kepentingan sama telah terorganisir bertindak untuk mengejar kepentingan yang sama.

Penggunaan teori diatas dipilih dengan harapan agar dapat menjelaskan aksi gerakan massa pada pemerintah Monarki Bahrain saat ini dikarenakan ketidakpuasan rakyat terhadap sistem yang Negara yang memberikan kekuasaan sewenang-wenang terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Ketidakpuasan terhadap pemerintah tersebut dirasakan oleh hampir semua rakyat Bahrain sehingga ini merupakan sebuah kepentingan yang sama.

Gerakan massa yang terjadi di Bahrain tersebut juga didukung pula oleh kondisi khusus yang mendorong rakyat untuk berani turun ke jalan untuk menuntut hak-hak mereka. Kondisi khusus tersebut adalah gerakan serupa di Mesir dan Tunisia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Community Learning Center atau yang biasa disebut sebagai CLC kemudian merupakan sebuah institusi pendidikan non-formal yang dalam penerapannya kemudian diperuntukkan untuk anak PMI yang kemudian bekerja di wilayah perkebunan ladang sawit. CLC kemudian dalam pelaksanaannya kemudian dibentuk atas kerja sama antara Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Perusahaan Ladang Sawit. Dalam kurun waktu dari tahun 2014 hingga 2019 telah terdapat 61 CLC Sarawak di mana kemudian pada tanggal 30 Maret 2019 Atdikbud KBRI Kuala Lumpur telah meresmikan CLC yang paling terbaru di Ladang Pelita Genaan di daerah Bintulu (KJRI Kuching, 2019). Dengan hal ini kemudian CLC di wilayah Sarawak hingga tahun 2019 telah memberikan pendidikan kepada 1.992 anak-anak Indonesia dengan 1.310 anak memiliki paspor namun tidak dengan *Student Pass* (KJRI Kuching, 2019). Dalam pembuatan sebuah CLC kemudian, Pemerintah Indonesia dalam hal ini kemudian tidak dapat langsung membangun gedung belajar/sekolah karena melewati batas- batas negara yang kemudian sudah diatur dan dimiliki oleh masing-masing negara. Oleh karena itu kemudian pemerintah Indonesia mencoba melakukan diplomasi dengan negara Malaysia mengenai pendidikan anak PMI yang dimulakan di negara *bagian* Sabah melalui *Annual Consultation* di tahun 2004 oleh Presiden RI saat itu Megawati Soekarnoputri dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi (Perdini, n.d.). Pada waktu itu kemudian pemerintah RI dan Malaysia bersepakat bahwasanya “*Indonesian Government could send teachers to Sabah to assist education service for Indonesian children*”. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada *Annual Consultation* di tahun 2006 dan pada *Joint Commission for Bilateral Cooperation/JCBC* RI-Malaysia ke-13, di Jakarta tahun 2013 yang kemudian menghasilkan kesepakatan pendirian CLC di wilayah kelapa sawit yang diperuntukkan untuk anak PMI yang berada di wilayah Sabah (Perdini, n.d.).

Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia Najib Tun Razak dalam pertemuan ini kemudian menghasilkan kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia, di mana kemudian PM Malaysia menyetujui untuk penubuhan / pembentukan CLC di wilayah Sarawak untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak PMI dengan merujuk pada panduan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (Perdini, 2020). Kemudian dalam pelaksanaannya Atdikbud KBRI Kuala Lumpur pada Juni 2015 melakukan pertemuan dengan Bahagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia di Putrajaya. Dari pertemuan itu kemudian ditetapkanlah garis panduan penubuhan / pendaftaran CLC di wilayah Sarawak, namun hal tersebut kemudian perlu didiskusikan kembali dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak di mana kemudian sebagai wilayah yang kemudian memiliki hukum dan yurisdiksi tersendiri yang berbeda dengan wilayah Malaysia Barat / Semenanjung. Lalu kemudian pada bulan Juli 2015 terjadi pertemuan antara KJRI Kuching dan Atdikbud KBRI Kuala Lumpur dengan pihak pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dengan agenda membahas garis panduan penubuhan / pendaftaran CLC di wilayah Sarawak. Dari hasil pertemuan ini kemudian dihasilkan kesepakatan, kemudian beberapa poin penting yang sangat diperhatikan oleh semua pihak di antaranya (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2015):

- **Pengertian PPK / CLC.** PPK / CLC diladang-ladang adalah institusi pendidikan sementara yang menyediakan kemudahan pendidikan atas untuk anak-anak yang sah kepada pekerja ladang warga negara Indonesia yang bekerja secara sah dan berumur antara 7 hingga 12 tahun di Negeri Sarawak (JPNS-KPM)
- **Penubuhan – Pendaftaran.** CLC ditubuhkan dan didaftarkan oleh syarikat ladang kepada KPM dan JPNS menggunakan tata cara yang telah ditetapkan dan disokong oleh Kerajaan Indonesia melalui KBRI/KJRI.
- **Lembaga Pengelola.** Pihak pengurusan ladang hendaklah melantik lima (5) orang Ahli Lembaga Pengelola CLC – minimal tiga (3) orang warga Malaysia termasuk Pengurus.
- **Guru Besar.** Setiap CLC harus memiliki seorang Guru Besar berkelulusan akademik / sarjana pendidikan yang kemudian bertanggung jawab terhadap pengurusan CLC. Guru Besar harus lulus pemeriksaan kesihatan dan memiliki permit mengajar.
- **Murid CLC.** Murid – murid hendaklah terdiri daripada anak – anak pekerja ladang Indonesia yang memiliki Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) di ladang-ladang di Negeri Sarawak sahaja, berumur dalam lingkungan tujuh (7) hingga dua – belas (12) tahun dan memiliki pas pelajar.

Melihat kemudian daripada itu, diadakan pertemuan antara Konsul Jenderal RI Kuching pada waktu itu bapak Jahar Gultom dengan Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah pada Agustus 2015. Dari hasil pertemuan itu kemudian, Pemerintah Negeri Sarawak memberikan kebenaran dan arahan untuk penubuhan CLC di Sarawak (Perdini, 2020). Perlu diketahui kemudian, Datuk Sri Fatimah Abdullah merupakan salah seorang yang menginisiasi dan mendukung adanya institusi CLC ini, beliau berpandangan bahwasanya anak-anak PMI yang telah datang ke Negeri Sarawak ini kemudian perlu diberikan fasilitas pembelajaran dan membuat mereka untuk tetap aman dari bahaya dan bekerja tidak di bawah umur kemudian. Hal ini kemudian sesuai dengan Akta Pendidikan 1996/Akta 550 yang menyebutkan bahwasanya: (Prime Minister Office, 1996).

“Memberi peluang kepada kanak-kanak bukan warganegara diterima masuk untuk mendapat pendidikan di sekolah.”

Setelah pertemuan itu kemudian KJRI Kuching – Atdikbud KBRI KL mengadakan pertemuan dengan Pengurus Besar Ladang Sawit Sarawak untuk penubuhan CLC di Sarawak, di mana kemudian pertemuan tersebut dilaksanakan di kota Miri pada Desember 2015 (Perdini, 2020). CLC Ladang Tiga, kemudian merupakan CLC pertama yang muncul di wilayah Sarawak. CLC ini hadir di kota Miri yang kemudian memberikan kemudahan dan layanan pendidikan kepada anak – anak PMI yang bekerja pada ladang tersebut (Perdini, n.d.).

Adapun tata cara dari penubuhan / pendaftaran dari CLC kemudian adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Proses Pendaftaran CLC

Dalam bentuk *partnership* yang kemudian dibentuk antar pemerintah yang diwakili oleh KJRI Kuching – Atdikbud KBRI KL dan juga Perusahaan Ladang Sawit kemudian memberikan layanan pendidikan terhadap anak PMI yang berada di wilayah ladang sawit masing-masing perusahaan yang membuka CLC ini kemudian. Mengambil contoh pada Ladang Ladong kemudian pihak perusahaan kemudian memberikan berupa ruang kelas yang layak pakai, perabotan kelas, perumahan guru sendiri, guru yang di angkat oleh pihak perusahaan lalu kemudian selain itu seluruh biaya operasional sekolah kemudian masuk dalam belanjawan / pembiayaan tahunan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti yang dituturkan oleh Manager Ladang Ladong yang berada dalam naungan Tradewinds Plantation Berhad, Tuan Razaisham Bin Shafei (Shafei, 2020).

Sedangkan dari pihak KJRI Kuching-Atdikbud KBRI KL kemudian memberikan fasilitas berupa Guru Bina yang kemudian direkrut dalam naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Dikti, kemudian pembuatan paspor, kemudian bantuan BANPEM (Bantuan Pemerintah), lalu kemudian juga mendapat ijazah yang resmi sehingga tidak perlu melakukan penyetaraan ataupun kejar paket A dan juga mendapat program repatriasi yang bernama Sarawak Bridge (Maruf, 2020). Menurut bapak Mokhammad Farid Maruf kemudian kerja sama ini kemudian bagi pihak Indonesia sendiri cukup menguntungkan, bagaimana kemudian melihat adanya kelonggaran dari Malaysia kemudian dari peraturan mereka terhadap Indonesia kemudian agar mereka juga tidak kehilangan para pekerja Indonesia dan hal ini kemudian menjadi salah satu hal untuk membuat kenapa CLC tetap bisa berdiri walaupun bertentangan dengan undang- undang ketenagakerjaan dan juga imigrasi Sarawak

(Maruf, 2020). Bagi pihak pemerintah Indonesia kemudian hadirnya *partnership* ini kemudian juga membantu meringankan beban pemerintah Indonesia di mana kemudian mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk biaya pembangunan infrastruktur seperti ruang kelas, maupun kebutuhan kelas lainnya karena dari pihak perusahaan sudah mampu memberikan fasilitas tersebut untuk menunjang kegiatan pembelajaran anak PMI di wilayah Sarawak (Maruf, 2020).

Selain itu kemudian menurut dari pihak perusahaan dengan adanya kemudian CLC ini kemudian banyak memberikan manfaatnya kepada pihak perusahaan, seperti kemudian yang terjadi pada ladang ladong ataupun ladang tiga yang berada di kota Miri. Bagi ladang ladong kemudian, hadirnya CLC ini kemudian banyak memberikan manfaat di antaranya kemudian lebih banyaknya kemudian perhatian pemerintah Indonesia dalam hal ini kemudian adalah KJRI Kuching banyak melakukan kunjungan ataupun agenda kegiatan di ladang ladong. Bentuk-bentuk kegiatan itu kemudian berbagai macam, seperti kemudian ditanggal 16 Februari 2020 diadakannya kegiatan kunjungan dari kepala BKKBN yang didampingi oleh Konsul Jenderal RI Kuching dalam kegiatan bakti sosial mengenai Keluarga Berencana (KB) yang kemudian disosialisasikan kepada PMI yang bekerja di ladang tersebut (KJRI Kuching, 2020), ataupun kemudian pada tanggal yang sama diadakannya kegiatan jemput bola guna penerbitan paspor bagi PMI yang bekerja di wilayah tersebut, bagi pihak perusahaan kemudian hal ini tentu saja cukup baik dan membantu bagi pihak perusahaan. Karena bagi perusahaan kemudian dengan adanya perhatian dari pemerintah Indonesia terhadap PMI maupun anak mereka ini juga membantu mengurangi beban dari mereka dalam mengurus anak-anak maupun PMI yang nakal ataupun tidak memiliki paspor / ijin kerja (Shafei, 2020). Menurut tuan Ruzaisham kembali, dengan setelah adanya CLC ini kemudian kinerja dari para pekerja / penombak kian membaik karena mereka tidak terlalu khawatir mengenai keberadaan anak-anaknya, namun terkadang CLC ini menjadi salah arti sebagai tempat penitipan anak dan orang tuanya tidak kunjung menjemput anaknya hingga pukul lima (5) sore hari. Beliau juga berharap kemudian dengan adanya CLC ini kemudian pendidikan anak-anak dan kehidupannya bisa lebih baik di masa depan dan tidak seperti orang tua mereka (Shafei, 2020).

Saat ini sudah cukup banyak pusat pembelajaran untuk anak PMI seperti CLC dan Sekolah Indonesia Luar Negeri yang berada di berbagai wilayah Sabah dan Sarawak. Namun, pusat-pusat pelayanan pembelajaran ini dipegang dan diawasi ketat oleh *United High Commissioner for Refugees* (Makhtar, Asari, & Yusob, 2015) dan kurang memperoleh dukungan dan simpati baik dari pemerintah maupun masyarakat Malaysia, terbukti dari 62 CL yang berada di wilayah Sarawak kemudian hingga hari ini hanya 16 CLC yang mendapatkan pengakuan dan disahkan sebagai sekolah bagi anak PMI yang bekerja di wilayah Sarawak. Alasan yang selalu hadir terhadap proses pengesahan sekolah yang diajukan selalu sama yaitu masih dalam proses verifikasi berkas dan segala hal lainnya.

Gambar 2. Peta Sebaran CLC Sarawak

Sumber: Lucky Fathria J., SH., Koordinator Penghubung CLC Wilayah Sarawak

Keterangan Gambar: Merah berarti CLC yang sudah terdaftar di JPNS ; Kuning berarti CLC yang belum terdaftar di JPNS.

Kemudian pada pertemuan bilateral antara Indonesia-Malaysia ke-12 yang diselenggarakan pada 22 November 2017 di Hotel Hilton, Kuching, Malaysia. Pemerintah Indonesia-Malaysia telah menyepakati kerja sama di berbagai bidang termasuk isu perlindungan warga negara Indonesia yang menetap dan bekerja di Malaysia. Isu ini penting karena perlindungan WNI menjadi prioritas bagi Pemerintah Indonesia. Presiden RI ke-7 Joko Widodo telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Mohd. Najib untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan hak pendidikan bagi Presiden RI Joko Widodo juga berharap bahwa PM Najib dapat memberikan dukungan terhadap perluasan pendirian CLC di Semenanjung maupun diluar ladang. Pertemuan kedua negara ke-12 tersebut berjalan dengan baik, hal ini menggambarkan bahwa hubungan bilateral kedua negara dalam kondisi yang sangat baik. Dalam pertemuan bilateral tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama antara Indonesia-Malaysia dalam bidang pendidikan tinggi Islam yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi dan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, Idris Jusoh (Caraka KBRI Kuala Lumpur, 2018).

Gambar 3. Annual Consulation Indonesia - Malaysia ke-12

Sumber: Jpp.go.id

Hingga 30 Juni 2019 terdapat 62 CLC di seluruh Sarawak, dengan memberikan akses pendidikan kepada 1.658 anak-anak Indonesia. Dengan tenaga pengajar Guru Lokal/Pamong yang merupakan warga negara Indonesia yang direkrut oleh pihak perusahaan untuk mengajar dengan minimum berijazah SMA/SMK. Hingga bulan Juni 2019 terdapat 94 orang Guru Pamong di CLC Sarawak dan Guru Bina merupakan guru yang dikirim oleh

Pemerintah Indonesia (Kemendikbud RI) untuk mengajar di CLC. Hingga bulan Juni 2019 terdapat 23 orang Guru Bina di CLC Sarawak (Caraka KBRI Kuala Lumpur, 2018).

Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Marco Schäferhoff dalam konsepnya, bahwasanya dalam pemenuhan *public goods* tanggung jawab tidak hanya ada pada sektor pemerintah saja namun juga perlunya sektor swasta untuk ikut kemudian peduli dalam pemenuhan hal tersebut walaupun kemudian terjadi *conflict of interest* di dalamnya dan juga *goals* yang berbeda dari masing-masing aktor.

Singkatnya, TPP adalah interaksi lintas batas yang berkelanjutan dan relatif dilembagakan antara aktor publik dan swasta yang secara formal mengupayakan penyediaan barang publik, sedangkan aktor swasta dapat mencari keuntungan dan / atau organisasi masyarakat sipil. Melihat dari konsep yang kemudian penulis pakai, keterlibatan antar aktor negara dan swasta sangat menonjol dalam kerja sama ini, di mana kemudian keterlibatan antar aktor dalam merumuskan kebijakan, dalam membangun institusi pendidikan maupun kemudian dalam pengimplementasiannya sangat terlihat dalam kerja sama ini. Walaupun kemudian banyak kesenjangan kebijakan keimigrasian, pengetahuan maupun hambatan-hambatan lainnya yang masih dihadapi dalam pemenuhan pendidikan anak PMI tersebut.

Bagaimana kemudian lobby-lobby yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil juga ditahun 2015 dengan adanya kesepakatan antara kedua pemerintahan yang kemudian dalam pengelolaan melibatkan pihak ketiga yakni perusahaan. Kelancaran dalam pembangunan maupun implementasi dari CLC ini juga dapat terlihat, hingga 30 Juni 2019, CLC di Sarawak telah memberikan akses pendidikan bagi 1.658 anak-anak Indonesia. Dalam menunjang pemberian pendidikan kemudian juga terdapat Guru Lokal/Pamong yang merupakan warga negara Indonesia yang direkrut oleh pihak perusahaan untuk mengajar dengan minimum berijazah SMA/SMK. Hingga bulan Juni 2019 terdapat 94 orang Guru Pamong di CLC Sarawak dan Guru Bina merupakan guru yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia (Kemendikbud RI) untuk mengajar di CLC. Hingga bulan Juni 2019 terdapat 23 orang Guru Bina di CLC Sarawak.

Pemberian akses pendidikan juga sudah terdapat pada 62 CLC yang telah tersebar diwilayah Sarawak, menunjukkan dalam hal ini konsep kerja sama TPPP sangat efektif jika pemerintah Indonesia ingin memberikan akses pendidikan bagi anak PMI diwilayah Sarawak yang terhalang oleh adanya batas-batas negara maupun aturan yang berlaku ketika ingin melaksanakan pemenuhan tersebut secara sendiri. Ada beberapa efek kemudian yang dihasilkan dari kebijakan kerja sama ini, dampak positif yang hadir kemudian adalah mampunya kemudian pelaksanaan maupun pemenuhan akses pendidikan kepada anak PMI diwilayah Sarawak dan juga dengan adanya kerja sama ini kemudian hubungan antar kedua negara kemudian menjadi baik.

Kemudian pada hal dampak negatif yang akan ditimbulkan dari skema pendidikan ini, mulai dari tidak teraturnya hukum yang berlaku hingga menjadi ajang bagi PMI untuk membenarkan membawa anak mereka ikut pergi bekerja bersama orang tuanya. Status dan juga kejelasan CLC maupun tenaga pengajar mengenai izin tinggal yang mereka miliki haruslah segera diberikan kejelasan agar kemudian ini tidak menjadi bom waktu yang kemudian menghantui baik bagi hubungan kedua negara maupun perusahaan yang kemudian memberikan akses pendidikan tersebut (Subroto, 2020). Selain itu, bentuk kerja sama ini tidaklah permanen, hal ini kemudian harus kembali dipikirkan oleh semua aktor mengenai jalan keluar dari masalah tersebut.

KESIMPULAN

Pendidikan menjadi suatu isu global yang sangat penting hari ini, melalui pendidikan kemudian nasib individu, masyarakat, negara maupun global ditentukan. Ketidakmampuan negara untuk memberikan akses/layanan pendidikan dapat ditutupi dengan skema kerja sama yang hadir melalui kemitraan bersama swasta. Dalam hal pendidikan anak PMI di wilayah Sarawak, melalui *Transnational Public Private Partnership* kemudian dapat memberikan akses terhadap pendidikan anak PMI di Sarawak, Malaysia.

Melalui kerja sama antar aktor yang kemudian memberikan bantuan untuk melakukan pemenuhan pendidikan dasar kepada anak PMI yang berada di Sarawak, Malaysia ini kemudian memberikan banyak manfaat dan juga masalah baru yang kemudian muncul dari kerja sama ini. Kerja sama ini kemudian dapat dilihat cukup berhasil tapi kemudian ada poin penting yang harus dipahami, bahwasanya bentuk kerja sama ini tidaklah permanen, hal ini kemudian harus kembali dipikirkan oleh semua aktor mengenai jalan keluar dari masalah tersebut. Bahwasanya ke depan harus muncul gagasan dan kebijakan yang baru untuk mengatur pendidikan bagi anak PMI yang berada di wilayah Malaysia, khususnya di negara bagian Sarawak.

DAFTAR PUSTAKA

- Caraka KBRI Kuala Lumpur. (2018). *Refleksi Layanan Pendidikan Anak Indonesia di Malaysia*. Retrieved from <http://kbrikualalumpur.org/w/wp-content/uploads/2018/04/CARAKA-FEBRUARI-for-print.pdf>
- Department of Labour Peninsular. (2014). *Policy on Employment of Foreign Workers. 2014*. Putrajaya: Ministry of Human Resources.
- Febriana, M. (2019a). Memperjuangkan Pendidikan Berkelanjutan bagi Anak TKI di Malaysia. Retrieved from Kumparan website: <https://kumparan.com/marisa-wardani/memperjuangkan-pendidikan-berkelanjutan-bagi-anak-tki-di-malaysia-1552987357316161628>
- Febriana, M. (2019b). Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar bagi Anak TKI di Malaysia. Retrieved from Kumparan website: <https://kumparan.com/marisa-wardani/pemenuhan-hak-pendidikan-dasar-bagi-anak-tki-di-malaysia-1552554039275273035>
- Kementerian Pendidikan Malaysia. (2015). *Guidelines Penubuhan Community Learning Center Sarawak*.
- KJRI Kuching. (n.d.). COMMUNITY LEARNING CENTRE (CLC) SARAWAK. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia website: <https://kemlu.go.id/kuching/id/news/1344/community-learning-centre-clc-sarawak>
- KJRI Kuching. (2019). *Laporan Khusus Perkembangan Pemberian Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Indonesia di Sarawak*.
- KJRI Kuching. (2020). Kepala BKKBN RI dr Hasto Wardoyo didampingi Konjen RI Kuching meninjau dan membuka kegiatan Bhakti Sosial “Keluarga Berencana” bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Ladang Simonjan, Sarawak. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia website: <https://kemlu.go.id/kuching/id/news/4865/kepala-bkkbn-ri-dr-hasto-wardoyo-didampingi-konjen-ri-kuching-meninjau-dan-membuka-kegiatan-bhakti-sosial->

- keluarga-berencana-bagi- pekerja-migran-indonesia-pmi-di-ladang-simonjan-sarawak
- Makhtar, M., Asari, K.-N., & Yusob, L. (2015). Right to Education for Irregular Migrant Children in Malaysia: A Comparative Analysis. *MalayPertanika Journal Social Sciences & Humanities*, 23(21).
- Maruf, M. F. (2020). *Peran Atase Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Implementasi Program CLC*. Bukit Bintang, Kuala Lumpur.
- Perdini, R. (n.d.). *Pelayanan Pendidikan untuk Anak Indonesia di Sarawak melalui Pusat Pembelajaran Komuniti (PPK)*.
- Perdini, R. (2020). *Peran KJRI Kuching Dalam Implementasi Program CLC*. Jakarta.
- Prime Minister Office. (1996). *Dasar Pendidikan Kebangsaan*. PMO Malaysia. Retrieved from http://www.pmo.gov.my/dokumenattached/Dasar/09DASAR_PENDIDIKAN_KEBANGSAAN.pdf
- Putra, A. (2017). Ada 2,7 Juta TKI di Malaysia, Menkumham: Ini Jumlah Terbesar dari Seluruh Dunia. Retrieved from Okezone News website: <https://news.okezone.com/read/2017/11/22/340/1818240/ada-2-7-juta-tki-di-malaysia-menkumham-ini-jumlah-terbesar-dari-seluruh-dunia>
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Kementerian Pendidikan Nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sarawak Lawnet. (n.d.). Labour Ordinance - Chapter 76. Retrieved from Sarawak Lawnet website: [http://lawnet.sarawak.gov.my/lawnet_file/Ordinance/ORD_F-LABOUR LawNet\(Watermark\)FRO.pdf](http://lawnet.sarawak.gov.my/lawnet_file/Ordinance/ORD_F-LABOUR LawNet(Watermark)FRO.pdf)
- Schäferhoff, M., Campe, S., & Kaan, C. (2007). Transnational Public-Private Partnerships in International Relations. *DFG Research Center (SFB)*, 700(6), 1–41. Retrieved from www.sfb-governance.de/%0Awww.sfb-governance.de/%5Cnwww.sfb-governance.de
- Shafei, T. R. bin. (2020). *Peran Perusahaan Dalam Implementasi Program CLC*. Samarahan, Sarawak.
- Suara Kalbar. (2019). 1.870 anak Indonesia sekolah di Sarawak. Retrieved from Suara Kalbar website: <https://www.suarakalbar.co.id/2019/08/1870-anak-indonesia-sekolah-di-sarawak.html>
- Subroto, U. (2020). *Peran KJRI Kuching Dalam Implementasi Program CLC*. Kuching, Sarawak, Malaysia.
- Sutianto, F. D. (2016a). 400.000 WNI di Sarawak, Ilegal Atau Legal? Retrieved from detikFinance website: <https://finance.detik.com/industri/d-3150796/mayoritas-pekerja-kebun-sawit-di-sarawak-adalah-wni>
- Sutianto, F. D. (2016b). Mayoritas Pekerja Kebun Sawit di Sarawak Adalah WNI. Retrieved from detikFinance website: <https://finance.detik.com/industri/d-3150796/mayoritas-pekerja-kebun-sawit-di-sarawak-adalah-wni>
- TribunJateng. (2016). Malaysia Restui Sekolah untuk Anak TKI di Sarawak, Indonesia akan Kirim Guru Tambahan. Retrieved from TribunJateng website: <https://jateng.tribunnews.com/2016/10/25/malaysia-restui-sekolah-untuk-anak-tki->

di-sarawak-indonesia-akan-kirim-guru-tambahan

UNESCO. (2015). *Final Report World Education Forum 2015*. Retrieved from http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/WEF_report_E.pdf

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.

Viviansari, D. B. (2019). Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia. *Jurnal HAM*, 10(2), 179. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.179-194>

Yin, R. K. (2003). *Case Study Research: Design and Methods Volume 5 of Applied Social Research Methods* (3rd ed.). Washington DC: SAGE Publications Ltd.